



SUMBER BERITA

KAMIS, 24 JANUARI 2019

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
X	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Sidang Dana BK Kota Makin Menarik

RBI, BENGKULU - Persidangan lanjutan kasus dugaan korupsi dana BK di Kota terus berlanjut. Jaksa Penuntut Umum Kejari Bengkulu Rabu (23/1) kemarin batal menghadirkan saksi. Dengan demikian pada Senin (28/1) persidangan dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi dari Jaksa Penuntut Umum.

Dimana dalam perjalanan persidangan, saksi sopir terdakwa Sofyan yang merupakan mantan Kepala BPKAD Kota Bengkulu menyebutkan jika Khairunisa bertemu dengan terdakwa. Pertemuan itu juga dihadiri oleh Sekda Kota Bengkulu Marjon M.Pd yang berada di Cafe Cimot di kawasan Jalan Asahan Kota Bengkulu. Sementara itu, hal

ini pun dibantah oleh Marjon saat dalam persidangan. Menurutnya kesaksian terdakwa merupakan rekayasa.

Jaksa Penuntut Umum Kejari Bengkulu, Daniel Hutagalung, SH mengatakan dihadirnya saksi ini untuk dimintai keterangan dari pihak terdakwa. Pasalnya dalam fakta persidangan, beberapa saksi menyebutkan jika Khairunisa pun berada dalam pertemuan tersebut. "Sebenarnya keterangan saksi yang kita ambil ini, terlebih dahulu ada yang melihat saksi Marjon dan Terdakwa Sofyan ada di suatu tempat. Kita hanya klarifikasi terhadap keterangan yang disampaikan," terangnya. "Sehingga diperlukan untuk kesaksian untuk melakukan konfrontir dari sopir terdak-

wa Sofyan ini. Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk pemanggilan saksi Khairunisa pada persidangan Senin mendatang (28/1)," tambahnya.

Sementara itu, pihaknya pun memastikan sudah melayangkan surat pemanggilan terhadap Khairunisa. Agar dapat menghadiri persidangan tersebut. "Kita telah memastikan surat tersebut disampaikan bersangkutan, semoga saksi hadir dalam persidangan," lanjutnya. Pada tahun anggaran 2015 lalu, Pemkot menganggarkan dana Beban Kerja sebesar Rp 5,4 miliar. Namun belakangan, berdasarkan audit BPKP, penganggaran dana Beban Kerja tersebut tidak sesuai aturan. Berdasarkan audit BPKP, neg-

ara dirugikan Rp 1,5 miliar. Puluhan saksi telah diperiksa dalam kasus dana Beban Kerja (BK) tersebut. Dimana seharusnya tunjangan dana BK dibayarkan pada bulan Agustus 2015. Tetapi tunjangan dana BK malah dibayarkan sejak bulan Januari 2015 sampai bulan Februari 2015 bahkan adanya perubahan Perwal yang mengatur pembayaran dana tersebut. Sementara sisa pembayaran pada bulan berikutnya belum ada kejelasan. Selain mantan Kepala DPKA, pihak penyidik Kejaksaan Negeri Bengkulu menetapkan Iksanul Arif selaku Kabid Pebendaharaan, Julian Toni Firdaus selaku Bendahara, Emiyati selaku Kasi Verifikasi sebagai tersangka dalam kasus tipikor tersebut. (Bro)